



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

BANTUAN SOSIAL DAN DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

Achmad Muchaddam Fahham
Analisis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Per tanggal 3 September 2022 kemarin pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Alasan mendasar yang digunakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah naiknya harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia ini berakibat pada meningkatnya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

Menurut Presiden Jokowi, di tahun 2022 anggaran subsidi dan kompensasi BBM telah meningkat tiga kali lipat dari 152, triliun menjadi 502,4 triliun. Angka itu bahkan diprediksi akan terus meningkat. Menurut Kementerian Keuangan RI ada tiga alasan yang dijadikan dasar kenaikan harga BBM. *Pertama*, subsidi dan kompensasi BBM belum tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh orang yang mampu. *Kedua*, kenaikan harga BBM dapat menurunkan tambahan beban subsidi dan kompensasi dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu dan rentan sehingga lebih tepat sasaran dan berkeadilan. *Ketiga*, harga BBM yang terlalu murah (di bawah harga keekonomiannya) menyebabkan kecenderungan orang lebih boros energi sehingga semakin tidak ramah lingkungan.

Pemerintah, menurut Kementerian Keuangan RI telah memperhitungkan dengan cermat dampak dari kenaikan harga BBM dan melakukan beberapa upaya berikut: *pertama*, kenaikan inflasi terjadi pada kisaran 1,88% -2,2% sehingga *outlook* 2022 akan mencapai 6,3-6,7%, masih moderat dibandingkan inflasi banyak negara. *Kedua*, pemerintah pusat dan daerah bersama BI menjaga inflasi tetap terkendali terutama harga pangan. Dampak rambatan kebijakan ini perlu diantisipasi. *Ketiga*, untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, pemerintah memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp.24,17 triliun guna menekan kemiskinan.

Pemerintah telah menggulirkan program bantuan sosial sejak 1 September 2022. *Pertama*, Bantuan Langsung Tunai BBM, sebesar Rp150.000. Bantuan ini akan diberikan selama empat bulan yakni September-Desember 2022. Jumlah bantuan sebesar Rp600.000 per penerima akan diberikan kepada 20,65 juta penerima. Untuk kebutuhan bantuan tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp12,4 triliun. Bantuan ini didistribusikan melalui POS Indonesia di mana pembayarannya dilakukan dalam dua termin, masing-masing Rp300.000.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp600.000. Bantuan Subsidi Upah diberikan kepada para pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Untuk kebutuhan bantuan tersebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun dan akan disalurkan kepada 16 juta pekerja. *Ketiga*, Bantuan Angkutan Umum. Bantuan ini akan diberikan kepada angkutan umum, ojek *online*, dan nelayan. Sumber anggaran bantuan ini berasal dari pemerintah daerah, dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun.

Center of Economic dan Law Studies (Celios) menyatakan kenaikan harga BBM akan menyulut naiknya angka kemiskinan. Lembaga ini memperkirakan angka kemiskinan akan bertambah hingga 10,5%. Pemerintah memang mengeluarkan anggaran bantuan sosial, tetapi anggaran itu tidak mencakup kelas menengah rentan yang jumlahnya 81 juta pekerja informal dan 64 juta unit pelaku UMKM. Analisis Makroekonomi dari Bank Danamon memperkirakan bahwa kenaikan harga BBM akan memicu inflasi, setidaknya pada akhir tahun 2022 inflasi bisa mencapai 6,1% YoY.

Peningkatan inflasi akan memicu naiknya suku bunga acuan. Ada kemungkinan hingga akhir tahun Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan lebih dari basis poin. Achmad Nur Hidayat dari Narasi Institute menilai bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kenaikan harga BBM bahkan akan memicu stagflasi, yakni kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Ketua umum Organisasi Angkutan Darat, Adrianto Djokosoetono menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan angkutan darat sekitar 5% sampai 15%, bergantung pada jenis angkutannya.

Atensi DPR

Meskipun pemerintah telah menggulirkan tiga bantuan sosial untuk menekan dampak yang lahir dari kenaikan harga BBM, kebijakan tetap akan melahirkan beragam dampak pada masyarakat. Mulai dari kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok, meningkatnya jumlah orang miskin, inflasi, stagflasi, suku bunga acuan Bank Indonesia, dan kenaikan ongkos angkutan darat. Penyaluran bantuan sosial sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM tersebut perlu memperoleh perhatian DPR RI, karena selama ini program-program bantuan yang digulirkan pemerintah selalu melahirkan masalah utamanya pada data penerima bantuan. Penyaluran bantuan selama ini acap kali kurang tepat sasaran karena data penerima yang kurang valid.

DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial. Persoalan data sejatinya merupakan persoalan klasik yang tidak kunjung selesai. Data yang valid akan meminimalisir kekurangtepatan sasaran penerima bantuan.

Sumber

kemenkeu.go.id, 8 September 2022;

kompas.com, 3 September 2022;

Kontan.co.id, 5 dan 13 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang

Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Venti Eka Satya
Nidya Waras Sayekti

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

@puslitbkd_official

©PuslitBK2022

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.